BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Posisi geografis kepulauan Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua. Indonesia juga memiliki kedaulatan terhadap laut wilayahnya meliputi; perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial (sepanjang 12 mill dari garis dasar). Disamping itu ada juga zona tambahan Indonesia, yang memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Selain itu, ada juga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sejauh 200 mil dari garis pangkal, dimana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam (perikanan), kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan, pemberian izin pembangunan pulau- pulau buatan, instalasi dan bangunan2 lainnya. (M Fredy, 2020).Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial. Terumbu karang Indonesia menyumbang sebanyak 21% kekayaan terumbu karang dunia dan 75% jenis karang di dunia dapat ditemui di Indonesia. Salah satu jasa lingkungan kelautan yang sangat prospektif mendukung perekonomian nasional adalah pengembangan pariwisata bahari. Skala nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berasal dari wisata bahari memberikan dampak positif bagi neraca keuangan negara, baik dari sisi pendapatan domestik maupun nasional atau Gross National Product (GNP). Pengembangan wisata alam bahari memiliki peranan yang sangat penting secara ekonomis maupun ekologis. Secara ekonomis, pengembangan wisata bahari berperan dalam peningkatan pendapatan devisa negara dan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Secara ekologis, pemanfaatan kawasan untuk wisata bahari ini dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut jika tidak dikelola dengan benar. Pengembangan wisata bahari perlu dikelola dengan konsep ekowisata, yaitu pendekatan berkelanjutan yang karakteristiknya adalah pengelolaan bentang alam diarahkan pada pelestarian sumberdaya, pengelolaan budaya masyarakat diarahkan pada kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan konservasi diarahkan pada upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumberdaya untuk masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembangan wisata bahari di TWP Pulau Pieh dan laut di sekitarnya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dengan tetap memperhatikan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. (Yustinaningrum, 2017)

Gumelar, 2010:1 dalam (Desiati, 2013) Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasar Pancasila. Implementasi pembangunan nasional adalah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Sehingga tercipta kerjasama antar masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu kualitas SDM harus senantiasa dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. SDM dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia/ penduduk, sedangkan aspek mencakup kemampuan SDM baik fisik maupun non fisik/kecerdasan dan mental melaksanakan pembangunan. Sehingga dalam proses pembangunan, bangan SDM sangat diperlukan sebab kuantitas Sumber Daya Manusia yang apa pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development paradigma).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Dari beberapa ulasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka.

Departemen Komunikasi 2016 dalam (Githa Girindra, 2020) Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling murah dan mudah untuk dikembangkan. Pengembangan sektor pariwisata dapat memberi sumbangan yang berarti kepada PDB, cadangan devisa, dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan Menteri Koordinator Maritim potensi sumbangan wisata maritime terhadap target perolehan 20 juta wisatawan di 2019 cukup besar, yaitu mencapai empat juta orang, jelas bahwa sumbangan untuk mencapai 20 miliar dolar AS dari pariwisata cukup besar dari sektor ini, Hal ini terbukti bahwa sektor pariwisata menjadi sektor industri yang berkelanjutan, maka perlu adanya alokasi dana yang memadai untuk pengembangan sektor pariwisata. Gubernur Bank Indonesia pada salah suatu diskusi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh ekonomi di daerah, oleh karena itu perlu dilakukan reformasi di berbagai sektor dan penguatan pada sektor riil, seperti penguatan daya saing di bidang kemaritiman dan pariwisata. Namun, masih banyak tantangan terhadap permasalahan yang terjadi pada sektor perikanan dan kelautan Indonesia, khususnya terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat pesisir yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan pelaku usaha pembudidayaan. Salah satunya terjadi pada masyarakat pesisir Pantai Sendang Biru yang terletak di wilayah Kabupaten Malang yang memiliki potensi sumberdaya dengan pengembangan di bidang sosial ekonomi.

Ada beberapa alasan mengapa penelitian mengenai pengembangan pariwisata itu penting untuk dilakukan, karena kegiatan di sektor kepariwisataan itu banyak memberikan dampak bagi daerah-daerah yang menjadi pusat pariwisata, dampak paling besar dari pengembangan pariwisata ialah perekonomian masyarakat. Dengan adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah maka kegiatan perekonomian akan berjalan dengan lancar, contoh kecil masyarakat yang ada disekitar tempat wisata dapat melakukan jual beli kebutuhan wisata, dengan begitu angka kemiskinan akan berkurang. Adapun dampak lain dari pengembangan pariwisata bagi pemerintah yaitu dengan adanya kegiatan pariwisata di wilayahnya maka wilayah tersebut akan lebih dikenal hingga dunia Internasional jika ada dukungan dan dorongan dari pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata ini. Dan masih banyak lagi dampak yang dipengaruhi Ketika pengembanangan pariwisata dapat berjalan dengan baik, selain itu Pada peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 tahun 2021 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2025 termuat dalam Bab VIII pasal 15 yang berisi 22 poin semua mengarah pada kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah. (*PERDA RIPPARDA TAHUN 2021-2025.Pdf*, n.d.)

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak ±165 Km arah tenggara kota Makassar. Secara astronomis, Kabupaten Bulukumba terletak antara 05°20'–05°40' Lintang Selatan dan 119°58'–120°28' Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Bulukumba memiliki panjang garis pantai kurang lebih 164 Km sehingga wilayah ini sering disebut sebagai daerah maritim. Selain itu, letaknya yang berada pada Laut Flores dan Teluk Bone menjadikan
en Bulukumba berada pada posisi jalur kepariwisataan dan jalur perdagangan
au yang terletak pada bagian selatan Jazirah Sulawesi. Ditinjau dari posisi
Kabupaten Bulukumba, maka wilayah ini mempunyai beberapa keuntungan
, yakni: pada bagian timur yang merupakan bagian dari daerah pesisir, di mana
ri aspek ekonomi akan berpengaruh terhadap peningkatan wisata di Kabupaten
ba dan perkembangan wilayah akan semakin dimungkinkan karena Kabupaten
ba yang akan memberikan peluang untuk mengalirnya investasi yang cukup

Optimized using
trial version
www.balesio.com

besar dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dilihat dari potensi wisata Kabupaten Bulukumba yang memiliki keunikan dan keunggulan lokal diantaranya adalah adanya kelompok masyarakat suku Bugis yang memiliki jenis keahlian membuat kapal phinisi dan budaya.

Kajang yang mempunyai budaya yang unik yang mempertahankan zaman tradisional hingga saat ini. Adanya 12 wisata bahari yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten 77 Bulukumba yaitu Pantai Tanjung Bira, Pantai Apparalang, Pantai Bara, Pantai Liukang Loe, Pantai Mandala Ria, Pantai Marumasa, Pulau Kambing, Pantai Samboang, Pantai Kasuso, Pantai Ujung tiro, Pantai Lemo-Lemo, Pantai Panrang Luhu menjadi salah satu fenomena alam yang luar biasa dan dan dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata sehingga mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan demikian, diperlukan pengelolaan yang profesional. (Riska et al., 2020).

Obyek wisata yang terpopuler di Bulukumba adalah wisata bahari yaitu wisata Pantai Tanjung Bira. Di samping itu, juga masih banyak wisata yang dapat ditemui yaitu Pantai Bara, Tebing Apparalang, Pantai Samboang, Pantai Marumasa, Pulau liukang loe dan masih banyak lagi destinasi wisata yang bisa di temui di sana. Dari sekian banyaknya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba hanya ada beberapa wisata yang di sekolah oleh Dinas Pariwisata, selebihnya di sekolah oleh masyarakat setempat. Destinasi wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba yaitu, Pantai Bira,Titik Nol, Puncak Pua Janggo, Pantai Samboang, Makam Dato Tiro, Permandian Hila-hila, dan Tebing Apparalang. Sedangkan destinasi wisata yang masih dikelola oleh masyarakat lokal yaitu Pantai ujung Tiro, Bakung-bakung view sunrise, Pantai Lemo-lemo, Perkebunan Karet Lonsum, Kawasan Adat Ammatoa, Gua Passohara, Pembuatan Perahu Phinisi di Tanah Beru, Pulau Kambing, Pantai Mandala Ria, Gua Passea, Phinisi Park, Pantai Marumasa, Pulau Liukang Loe, Pantai Kasuso, Tebing Panaikang Biraya, Pantai Pusahelu, Taman Cekkeng, Pantai Kaluku, Bulu Padido, Telaga Biru Ere Manerang, Mangrove Luppung Manyampa. Pengembangan industri pariwisata dapat membantu mendorong peningkatan pendapatan devisa pada khususnya, pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. (Reskiyani et al., 2022).

Kecamatan Bontobahari memiliki beberapa destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan, diantaranya Pantai Tanjung Bira, Pantai Bara, Pantai Marumasa, dan Pantai Kasuso yang terletak di Desa Bira serta Wisata Tebing Apparalang dan Pantai Mandala Ria yang terletak di Desa Ara dan wisata budaya perahu pinisi di Desa Ara. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tengah menggarap pengembangan desa wisata untuk mengoptimalkan pemerataan ekonomi di daera-daerah pedesaan. Banyak desa yang memiliki ciri khas dan daya tarik masing-masing yang mendukung Kabupaten Bulukumba sebagai daerah destinasi wisata. Desa-desa tersebut kemudian dikembangkan menjadi desa wisata yang menawarkan berbagai macam potensi yang dimiliki. Menurut data statistik, hingga saat ini terdapat 15 desa wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan di seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 mencapai 20.486 wisatawan. Desa wisata yang terdapat di Kabupaten Bulukumba menawarkan berbagai macam potensi yang dimiliki antara lain perbukitan, perkebunan, pantai, tebing, pembuatan perahu pinisi dan lokal lainnya. Desa wisata Ara adalah salah satu desa wisata di Kabupaten ba yang terdapat di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba jarak kurang lebih 37,8 kilometer dari pusat Kota Bulukumba. Desa Ara ini an salah satu desa yang diarahkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba njadi desa wisata karena Desa Ara memiliki potensi alam, budaya, dan seni al., n.d.)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tabel 1.1 Potensi Wisata Desa Ara

No.	Jenis Wisata	Potensi
1.	Wisata Alam	Pantai Apparalang, Gowa Passohara dan Pantai Mandala Ria
2.	Wisata Budaya	Sentra Pembuatan Kapal Phinisi

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemudan dan Olahraga, Kabupaten Bulukumba, 2020

Pantai nan teduh di Bulukumba, Mandala Ria. Dari kejauhan keindahan laut sudah terlihat, semakin mendekat semakin terlihat kilauan pasir putih dan beberapa perahu yang sedang dibuat oleh para pekerja. Pantai Mandala Ria sungguh menampilkan pemandangan yang menakjubkan, memiliki pasir putih yang berderai halus dan air laut yang sangat jernih. Selain keindahan pantai, Mandala Ria juga memiliki nilai sejarah yang patut untuk dilestarikan karena dahulu di pantai inilah Panglima Mandala memesan puluhan kapal dalam rangka pembebasan Irian Barat dari Kolonial Belanda, oleh karena itu pantai ini dinamakan Pantai Mandala Ria. Sebelum bernama Mandala Ria, pantai berpasir putih ini disebut Turungan Ara atau Tamparang Ara. Perubahan nama menjadi mandala ria berkaitan dengan perjuangan merebut Irian Barat (Papua) dari penjajah Belanda. Pada tahun 1961 panglima Mandala Mayjen Suharto melalui perwira penghubung memesan 20 buah perahu pendarat (model sekoci) ukuran 9 x 2 x 0,90 M untuk dijadikan perahu pendarat bagi pasukan/tentara di Irian Barat. Kedua puluh buah perahu tersebut dikerjakan oleh 20 kelompok pekerja yang dikoordinir langsung oleh Andi Padulungi (Kepala Distrik/Karaeng Ara) waktu itu dan selesai dalam tempo 20 hari. Setelah perahu tersebut selesai, diangkut ke Irian dengan KM. Rajawali namun karena kapasitas kapal terbatas, sehingga hanya 13 buah perahu yang berhasil dibawa ke Irian (Papua). Namun selain dari keindahan yang tampak dari pantai Mandala Ria ada pula beberapa Fenomena atau masalah yang dihadapi masyarakat di desa Ara terkait pengembangan wisata Pantai Mandala Ria adalah sebagai berikut:

a. Akses jalan

Kemudahan akses dan konektivitas sangat penting untuk menarik dan memudahkan wisatawan dalam mengunjungi berbagai potensi wisata di Bulukumba. Perlunya semua pihak mendorong kemudahan akses menuju destinasi wisata untuk menggaet lebih banyak wisatawan. Tantangan utama untuk mengembangkan obyek wisata pantai Mandala Ria adalah masalah akses yang sedikit rusak dan terbilang ekstrem.

b. Kurangnya berbagai prasarana dan sarana

Ketersediaan prasarana instalasi listrik untuk saat ini masih memakai bentangan dari biaya masing-masing individu, kurangnya sarana seperti villa atau penginapan untuk saat ini masih berjumlah tiga penginapan yang biasa menjadi fasilitas bagi wisatawan yang ingin menginap.

c. Menciptakan souvenir pariwisata

nya, tindakan seperti ini tidak dijalankan dan mungkin terdapat alternatif lain emproduksi souvenir pariwisata bahari. Prinsip pariwisata bahari berkelanjutan kan pentingnya menciptakan produk-produk lokal melalui ciri khas maritime engganggu atau merusak lingkungan alam.

/a perhatian dalam pelestarian lingkungan

aku atau tindakan masyarakat lokal yang bekerja di sektor pariwisata, namun emperhatikan pelestarian lingkungan. Salah satu isu penting yang perlu

Optimized using trial version www.balesio.com

diperhatikan di kawasan Mandala Ria adalah menjaga lingkungan ditengah-tengah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sentra kapal Pinisi yang tentu menjadi poin penting dalam menikmati wisata alam bahari.

e. Masih lemahnya keterampilan yang profesional

Masih lemahnya keterampilan yang dimiliki para pemberi layanan yang ada di kawasan wisata Mandala Ria. Idealnya, para pemberi layanan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan pelayanan maksimal kepada wisatawan atau pengunjung. Terlebih lagi mereka yang berhadapan langsung dengan pengunjung atau wisatawan asing yang harus menggunakan Bahasa internasional bahasa Inggris tentunya sangat penting bagi pengelola destinasi wisata Pantai Mandala Ria untuk menguasai Bahasa Inggris.

Berdasarkan penelitian (Fitriani et al., 2020) dengan judul penelitian Strategi Komunikasi Dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai Mandala Ria Di Kabupaten Bulukumba mengemukakan bahwa Peluang mengembangkan pantai Mandala Ria Ara-Lembanna yakni keindahan pantai dan pelestarian sejarah dan memadukan antara wisata bahari dan wisata budaya. Sedangkan tantangan mengembangkan obyek wisata pantai Mandala Ria Ara-Lembanna yakni akses jalan, kepemilikan lahan, peningkatan sumber daya manusia, kurangnya promosi wisata, dukungan pemerintah kabupaten belum optimal, masih lemahnya keterampilan yang profesional, kurangnya perhatian dalam pelestarian lingkungan, dan menciptakan souvenir pariwisata.

Potensi utama masyarakat Ara Lembanna dalam mengembangkan obyek wisata pantai Mandala Ria yaitu wisata bahari sebagai aktivitas utama para wisatawan. Potensi penunjang masyarakat Ara-Lembanna dalam mengembangkan obyek wisata pantai Mandala Ria yaitu wisata budaya yang bisa memberikan edukasi kepada para wisatawan saat berkunjung ke pantai Mandala Ria. Wisata budaya yang menarik di Kawasan ini adalah salah satu sentra pembuatan kapal Pinisi di Kabupaten Bulukumba. Pinisi adalah lambang keperkasaan suku Bugis Makassar di lautan dan merupakan warisan budaya bangsa bahari nusantara. Warisan budaya dengan ciri khas dua tiang dan tujuh layar tersebut merupakan puncak dari suatu proses pembuatan yang dengan anggun dan perkasanya mengarungi luas. Pengembangan potensi obyek wisata pantai Mandala Ria tidak terlepas dari peran pemuda yang turut andil di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan baik itu di desa Ara maupun Lembanna. Selain potensi wisata bahari dan wisata budaya, potensi sosial budaya juga turut andil dalam proses pengembangan pariwisata, diantaranya ciri khas rumah adat, ciri khas seni ukir, ciri khas seni tari, permainan rakyat, upacara ritual kapal phinisi, Dumpi dan Uhu-uhu kue khas Ara Lembanna.

Bulukumba merupakan kabupaten yang sangat kaya, baik dalam bidang Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), kebudayaan, dan juga alamnya yang sangat indah. Sayangnya, potensi kekayaan yang dimiliki Bulukumba kurang dipahami dengan baik sehingga usaha pengembangan atau eksplorasi kekayaan ini tidak dilakukan secara maksimal. Hanya segelintir pihak yang menyadari bahwa kekayaan Bulukumba bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan individu, kelompok, sebagian masyarakat, bahkan untuk keuntungan daerah. Kekayaan alam yang dimiliki Bulukumba mampu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya. Daya tarik yang dimiliki Bulukumba tentu memiliki harga jual yang sangat mahal sehingga menarik sejumlah pihak yang berkepentingan atau yang memiliki kuasa atas wilayah tersebut untuk mengklaim bahwa sektor tersebut berada di bawah
an mereka. Pada tahapan inilah kemudian kepentingan berbagai pihak mulai
ran, mulai dari kepentingan pemerintah daerah, investor, tokoh masyarakat
pengaruh, sampai pada masyarakat lokal itu sendiri. Kepentingan ini mulai tarik
sampai memunculkan konflik lokal di daerah tersebut

permasalahan yang telah ditinjau peneliti diatas maka Adapun rumusan
yang menjadi rujukan dari penelitian ini adalah bagaimana *Local Tourism*
nce dalam pengembangan wisata pantai mandala ria di Desa Ara kecamatan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BontoBahari Kabupaten Bulukumba?

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1 Pendekatan *Governance*

Menurut (Bavinck & Kooiman, 2019) Tata kelola telah menjadi semboyan dalam ilmu-ilmu sosial dan juga dalam dunia kebijakan. Istilah ini sudah digunakan bahkan

Sebelum dikenal secara luas pada awal tahun 1980an, ketika Bank Dunia memperkenalkan norma pemerintahan yang baik' terhadap pembangunan internasional. Pendekatan tata kelola juga menunjukkan adanya perbedaan penting antara pengelolaan, pembuatan kebijakan, dan tata kelola. Perbedaan-perbedaan ini tidak bersifat langsung dan tegas, dan mungkin berbeda tergantung budaya dan bahasa. Oleh karena itu, apa yang diistilahkan sebagai 'kebijakan' dalam budaya politik Anglo- Saxon dapat diistilahkan sebagai 'pemerintahan' dalam tradisi berbahasa Perancis; Sebaliknya, para penulis Amerika mungkin menyebut fenomena yang sama sebagai 'manajemen'. Dalam buku ini, kami berpandangan bahwa tata kelola adalah istilah yang lebih inklusif, diikuti oleh kebijakan, dan terakhir adalah manajemen. Dibandingkan dengan para manajer dan pembuat kebijakan, gubernur mengambil langkah mundur dan memperluas pandangan mereka dengan berbagai cara. Dengan demikian, tata kelola tidak hanya sekedar mengatasi permasalahan yang ada, namun juga mempertimbangkan tren dan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan ini tidak membatasi diri pada satu sektor tertentu saja, seperti perikanan, namun mempertimbangkan isu-isu sektoral sebagai cerminan dari keadaan yang lebih umum terjadi.

Tata kelola, dari sudut pandang ini, berasal dari banyak sumber, seiring dengan upaya sejumlah besar aktor untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam perjalanan mereka. Karena masyarakat tidak berhenti sejenak, dan tidak pernah berada dalam keseimbangan, keseluruhan upaya tata kelola ini bagaikan banyaknya tangan yang membentuk tanah liat pada roda tembikar. Beberapa tangan memiliki keunggulan dibandingkan yang lain, namun tidak pernah sedemikian rupa sehingga mereka sepenuhnya menentukan bentuk pot yang sedang dibuat. Lagi. Selain itu, tidak seperti tanah liat pembuat tembikar, para aktor yang diatur bereaksi terhadap tangan yang membentuknya. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan bukan sekedar sesuatu yang dilakukan oleh para gubernur, namun merupakan suatu kualitas dari totalitas interaksi antara mereka yang memerintah dan yang diperintah – pemerintahan itu sendiri merupakan suatu interaksi.

1.2.2 Konsep Pengembangan Pariwisata

1.2.2.1 Pariwisata

Secara etimologi pariwisata berasal dari sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. Pariwisata yaitu suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu dalam kurun waktu tertentu.

Sektor pariwisata merupakan satu dari lima sektor unggulan selain minyak bumi, ı, kayu, dan tekstil. Pariwisata diarahkan untuk dapat menggalakkan sektor dan sektor-sektor lainnya yang terkait, sehingga dapat meningkatkan tan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar objek wisata tersebut, daerah ıra. Sektor ini juga diharapkan dapat mengurangi pengangguran, memperluas ıtakan pembangunan. (Novalia, S., Waliah, S., Rahayu, 2021)

Visata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tarik wisata. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/negara karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/negara disebut daya tarik dan atraksi wisata. Penggolongan jenis objek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata yang dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- Obyek wisata alam, misalnya: laut, pantai, gunung, danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.
- Obyek wisata budaya, misalnya: upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum dan lain lain.
- Obyek wisata buatan, misalnya: sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobat, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Strategi Penataan Ruang dan Pengembangan Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2021 sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya,
2. Strategi pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal
3. Strategi peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan
4. Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana
5. Strategi Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan Pelestarian Lingkungan
6. Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten

Listyaningsih menyatakan dalam Iqbal, 2022 apapun yang menjadi tujuan pembangunan, sesungguhnya pembangunan masyarakatlah yang harus diperhatikan. Posisi masyarakat bukan menjadi objek pembangunan tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat juga menjadi subjek pembangunan. Jadi dalam proses pembangunan, masyarakat juga memiliki peranan dalam penentuan arah pembangunan dan menjadi pelaku pengawasan terhadap suatu pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bulukumba mengenai rancangan induk pengembangan kepariwisataan daerah.

1.2.2.2 Konsep Kepariwisataan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pemahaman awal mengenai konsep kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari gi dari kata wisata, pariwisata dan kepariwisataan. Sebagaimana tercantum ndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan

dalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok engan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan tau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka

waktu sementara.

b. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah
c. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan
d. bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

1.2.2.3 Prinsip-Prinsip Pengembangan Pariwisata

Menurut Zaenuri (2012 hal 111) menjelaskan bahwa Untuk mengembangnkan pariwisata maka diperlukan pertimbangan prinsip-prinsip berikut ini :

a. Pengembangan pariwisata harus dapat merumuskan tujuan pengmbangan pariwisata secara jelas dan tegas sehingga mudah dipahami oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata.
b. Pengembangan pariwisata harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas, terutama harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya.
c. Pengembangan pariwisata harus didasarkan pada alasan yang kuat, oleh karena itu sebelumnya harus dilaksanakan penelitian untuk menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.
d. Pengembangan pariwisata harus dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu pengembangan harus dapat merumuskan rencana pengembangan pariwisata yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

1.2.3 Good Tourism Governance

1.2.3.1 Tata Kelola Di Sektor Pariwisata : Pendekatan Konseptual

Pariwisata adalah sektor kegiatan yang melibatkan banyak keterkaitan antar berbagai jenis pelaku dan pelaku intervensi dalam produksi barang dan jasa yang dikonsumsi pengunjung. Dalam rangka ini, fungsi pemerintah, dalam kondisi saat ini, sangat relevan dalam mengkoordinasikan upaya untuk membantu memastikan bahwa dinamika pertumbuhan permanen yang dicapai pariwisata sampai saat ini secara ekonomi, sosial dan lingkungan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan. Sementara produksi Pariwisata dapat dianalisis dan diteliti berdasarkan hubungan kolabotarif antara sektor public dan swasta dang penghuni tujuan wisata, dipandang sebagai sektor kegiatan,, pariwisata mencakup kenyataan yang jauh lebih kompleks, karena sifat tanggung jawab yang terbesar untuk pengembangan, dibagi karena mereka berada di sepanjang jaringan actor yang yang luas dan rumit seperti yang digambarkan dalam rincian menurut Duran (2013 hal 12) sebagai berikut:

a. Sektor swasta, sebagai penghasil utama daan pemasok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengunjung, terdiri dari beragam unit ekonomi yang ditentukan sebagai fungsi dari ukuran dan jangkauannya (usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, baik lokal, regional, nasional, atau transnasional) yang terdiri dari berbagai bidang kegiatan produktif mulai dari manufaktur, perdagangan, transportasi hingga berbagai macam layanan (perhotelan, makanan dan minuman, kegiatan budaya dan rekreasi, dll) yang kan karakter yang agak fragmentaris ke sektor pariwisata.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Sektor public, yang peran dasarnya berdasarkan fungsi sehubungan dengan berbagai bidang kegiatan yang secara menyakinkan mempengaruhi bagaimana pariwisata dikembangkan di suatu negara atau wilayah (pengembangan infrastruktur, perencanaan, kebijakan transportasi, masalah fiscal, pekerjaan, dll) juga ditandai oleh keragaman pelaku dan agen yang berdampingan. Eksistensi semacam itu terjadi dalam dua dimensi: secara horizontal, yaitu dalam hal legislative (parlemen. Kongre) dan atau cabang eksekutif, umumnya melalui lebih dari satu kementerian atau departemen, instansi, dan lain-lain. Masing-masing dapat memiliki tanggung jawab untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata pada saat yang sama. Dam secara vertikal, mengingat berbagai tingkat pemerintahan (lokal, regional, provinsi, nasional dll) yang ada di negara yang ditentukan, tergantung pada bentuk organisasi teritorial yang bersangkutan.
c. Penduduk yang menghuni sekitar tujuan wisata- berperan sebagai aktor kunci dalam mengelola destinasi wisata yang berada di wilayah mereka. Namun, penelitian empiris telah menemukan bahwa ini lebih sering berbentuk industri gabungan daripada membantu merancang dan menerapkan mekanisme partisipasi public yang luas, membatasi intervensi dan kontribusi sosial yang berorientasi pada perencanaan dan pengelolaan tujuan ini.

1.2.3.2 Teori Dan Konsep *Good Tourism Governance*

Penelitian tentang tata kelola pengembangan pariwisata ini menggunakan teori tata kelola kepariwisataan yang baik/good tourism governance (Sunaryo, 2013) dalam Penerapan good tourism governance terdiri dari 10 prinsip (Sunaryo, 2013) sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat setempat mempunyai peran dalam pembangunan atau pengembangan pariwisata sebagai pengawas atau controlling yaitu keikutsertaan dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata. Selain itu masyarakat juga harus terlibat pada saat pengimplementasian rencana dan program yang sebelumnya disusun.

b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, para pelaku dan pemangku kepentingan dilibatkan secara aktif dan produktif. Antara lain seperti adanya kelompok sukarelawan, institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pariwisata, asosiasi industri wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang mempunyai pengaruh serta kepentingan kemudian melibatkan juga yang akan menjadi penerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan tersebut.

c. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, kepemilikan lokal harus sanggup dalam memberikan dan membuka kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Seharusnya melalui model kemitraan strategis, secara Bersama masyarakat dilibatkan dalam mengelola, mengembangkan dan memelihara bersama usaha-usaha fasilitas penunjang kepariwisataan serta restoran, hotel, cinderamata, dan transportasi wisata.

d. Pemanfaatan Sumber Daya Berkelanjutan

ram kegiatan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus
ı bahwa sumber daya alam dan buatan yang ada dapat dipelihara dan
i dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang
ıku, artinya penggunaan sumber daya dalam pembangunan kepariwisataan
pat digunakan secara berkelanjutan, dan menghindari penggunaan sumber
g tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

e. Pengakomodasian Aspirasi Masyarakat

Dalam program kegiatan kepariwisataan, aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan agar menimbulkan situasi atau kondisi yang harmonis antara pengunjung/ wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat. Seperti adanya kerja sama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau cultural tourism partnership yang dapat dilakukan dengan tahap perencanaan, pengelolaan atau manajemen, sampai tahap pemasaran.

f. Daya Dukung Lingkungan

Setiap pembangunan atau pengembangan kepariwisataan, daya dukung lingkungan harus ada, dalam pelaksanaannya harus sesuai dan serasi dengan batas batas kapasitas lokal dan daya dukung yang ada tersebut. hal itu merupakan sebagai pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan yang meliputi daya dukung fisik, biotik, ekonomi, dan sosial-budaya.

g. Monitoring dan Evaluasi

Dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan, program kegiatan mengawasi/monitoring dan evaluasi mencakup beberapa kegiatan yaitu penyusunan pedoman, evaluasi dampak dari kegiatan wisata, pengembangan indikator-indikator serta Batasan - batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

h. Akuntabilitas Lingkungan

Perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program, dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian yang besar pada saat perencanaan program pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan berlanjut, manajemen perhotelan secara berlanjut, serta hal lain yang relevan dengan wawasan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan yang holistic.

i. Pelatihan Pada Masyarakat

Terkait pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, karenanya pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk menjadi sarana pembekalan masyarakat dan untuk meningkatkan kemampuan bisnis secara vocational dan profesional.

j. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Program-program promosi dan advokasi juga dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan, di antaranya promosi dan advokasi penggunaan jala, penggunaan lahan, dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap (sense of place) serta identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Penggunaan lahan dan kegiatan kegiatan yang dilakukan tersebut harus bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas dan memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan menurut (Hidayati, 2018) dalam (Mojokerto, 2024) yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan
asi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi
g sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta
ustri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. Good governance
an arah baru administrasi publik yang dalam dekade sekarang cenderung
pankan konsep tersebut dalam mengelola berbagai kepentingan dan urusan
lalui berbagai keputusan publik dengan melibatkan lebih banyak petaruh diluar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.2.4 Local Tourism Governance

Dalam literatur pariwisata, semakin banyak penelitian studi kasus yang mengkaji pembuatan kebijakan pariwisata lokal dan kolaborasi dan kompleksitas organisasi Fokusnya sebagian besar bersifat eksploratif dan deskriptif dengan pertimbangan terbatas mengenai efektivitas tata kelola pariwisata lokal. Salah satu penjelasan atas kesenjangan ini adalah bahwa banyak peneliti aktif di bidang ini, termasuk penulis saat ini, cenderung mengadopsi perspektif konstruksionis sosial yang bersifat eksploratif dan lebih memilih untuk menghindari membuat asumsi tentang apa yang dimaksud dengan tata pemerintahan yang baik. Sebagai sebuah konsep dialektis, ia hanya dapat didefinisikan dari "dalam" oleh mereka yang terlibat dalam jaringan dan berdasarkan sistem nilai mereka. Akibatnya, sedikit sekali diskusi mengenai efektivitas dan dampak tata kelola terhadap kebijakan yang relatif terfragmentasi, dan karena adanya perbedaan dalam sistem pemerintahan daerah di seluruh dunia, membandingkan dan membedakan studi-studi yang beragam ini merupakan sebuah permasalahan. Dalam tinjauan literatur berikut ini, karakteristik organisasi pariwisata lokal dibahas dan dimensi tata kelola diidentifikasi.

Efektivitas tata kelola pariwisata lokal dalam mencapai tujuan para pemangku kepentingannya bergantung pada efektivitas struktur dan proses kelembagaan, serta sumber daya relasional dan keahlian yang tersedia. Untuk mengatasi efektivitas komparatif pengaturan tata kelola yang berbeda, parameter tata kelola pariwisata lokal yang baik diperoleh dari tinjauan literatur yang ekstensif Parameter ini meliputi:

a. Budaya positif, komunikasi konstruktif, dan komunitas yang terlibat ukuran dewan direksi, proporsi pemegang saham besar, dan keberagaman gender di dewan mempunyai hubungan positif dengan kinerja perusahaan pariwisata. Penelitian serupa telah dilakukan di industri lain. Penelitian ini mengkaji hubungan ini dalam industri pariwisata, memberikan kontribusi langsung pada literatur pariwisata tentang tata kelola dan memperkaya pengetahuan tata kelola dari perspektif penelitian pariwisata. (Yeh & Trejos, 2015) dari kutipan tersebut bahwa pengembangan pariwisata erat kaitannya dengan berbagai aspek yang dapat mendukung kelancaran pengembangan pariwisata.
b. Transparansi dan Akuntabilitas, Transparansi dan akuntabilitas merupakan parameter penting dalam tata kelola yang baik karena memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa bahwa masukan mereka bermanfaat dan pengambilan keputusan dilakukan melalui proses yang baik. (Beaumont & Dredge, 2010) dari kutipan ini pengembangan pariwisata tentunya memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas.
c. Visi dan Kepemimpinan, pemerintahan yang efektif harus memiliki rincian seperti yang diserukan Simon pada tahun 1947 dan mampu menjelaskan efektivitas. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kerangka kerja seperti itu tidak diperlukan untuk menjelaskan permasalahan mendasar yang ada bagaimana pemerintah mengidentifikasi apa yang perlu mereka lakukan pada waktu tertentu, dan mengelolanya dengan baik. Memahami bagaimana tantangan diidentifikasi dan diatasi adalah lebih kompleks daripada mengatakan bahwa hal ini adalah dasar efektivitas; Pemahaman dan penjelasan memerlukan kerangka kerja yang saat ini belum ada dalam domain pengembangan. (Andrews, 2008) pada aspek ini pemerintah harus dapat memberikan gambaran atau tujuan yang akan dicapai dari pengelolaan wisata dalam hal ini pengembangan wisata Pantai Mandala Ria.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

d. Penerimaan keberagaman, upaya mencapai kesetaraan dan inklusivitas menurut (Beaumont & Dredge, 2010) beragam jaringan kepentingan yang diambil dari masyarakat adat dan komunitas lainnya, industri pariwisata dan pemerintah. Menurut STC, jaringan ini kadang-kadang ditandai oleh konflik, namun menemukan tujuan bersama dan mengakui kepentingan pihak lain memungkinkan jaringan untuk bergerak maju: “Beberapa konflik awalnya muncul antara kepentingan lingkungan dan pariwisata, namun fokus pada keberlanjutan pariwisata secara efektif menyatukan kedua faksi ini”. Dari kutipan ini pentingnya aspek menerima keberagaman demi mencapai tujuan Bersama.
e. Mengembangkan pengetahuan, belajar dan berbagi keahlian, Jaringan yang dipimpin peserta di Pulau Stradbroke Utara dicirikan oleh keanggotaan yang memiliki pengetahuan luas tentang lingkungan dan pariwisata Pulau. Banyak anggotanya mereka berpendidikan tinggi dengan komitmen kuat untuk berbagi pengetahuan dan menggunakannya secara efektif untuk melobi perbaikan pengelolaan pariwisata. Peserta dalam jaringan adalah anggota jaringan lain Demikian pula, jaringan yang dipimpin LTO menunjukkan komitmen terhadap pertukaran informasi, komunikasi dan pendidikan di dalam dan di luar basis keanggotaan langsung. GM mencerminkan pemahaman yang sangat mendalam dan kompleks tentang pariwisata yang dibangun dari waktu ke waktu dan mengkomunikasikannya kepada jaringan industri. Misalnya, mereka dilibatkan sebagai konsultan pada pemerintah daerah setempat dan berbagi keahlian pemasaran, survei industri, dan riset industri umum. (Beaumont & Dredge, 2010) berdasarkan kutipan ini bahwa aspek pengembangan pengetahuan dan peningkatan keahlian sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata agar dapat mendukung laju perkembangan pariwisata.
f. Peran dan tanggung jawab peserta yang jelas dan struktur operasional serta proses jaringan yang jelas, (Baumont & Dredge, 2010) “seluruh peran saya didasarkan pada strategi pariwisata berkelanjutan, yang dengan jelas menunjukkan bahwa pendekatan baru harus diambil di kawasan ini karena di masa lalu terdapat banyak pemasaran ad hoc yang dilakukan. , penjualan dan promosi serta periklanan ad hoc, namun tidak memiliki struktur dan strategi” dari kutipan ini menjelaskan bahwa semua peran, tanggung jawab, struktur operasional, dan proses jaringan harus jelas dalam pengembangan pariwisata agar tata Kelola yang ada pada wisata tersebut dapat dipatuhi oleh semua elemen yang terlibat di dalam kegiatan kepariwisataan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gambar 1.1
Kerangka fikir

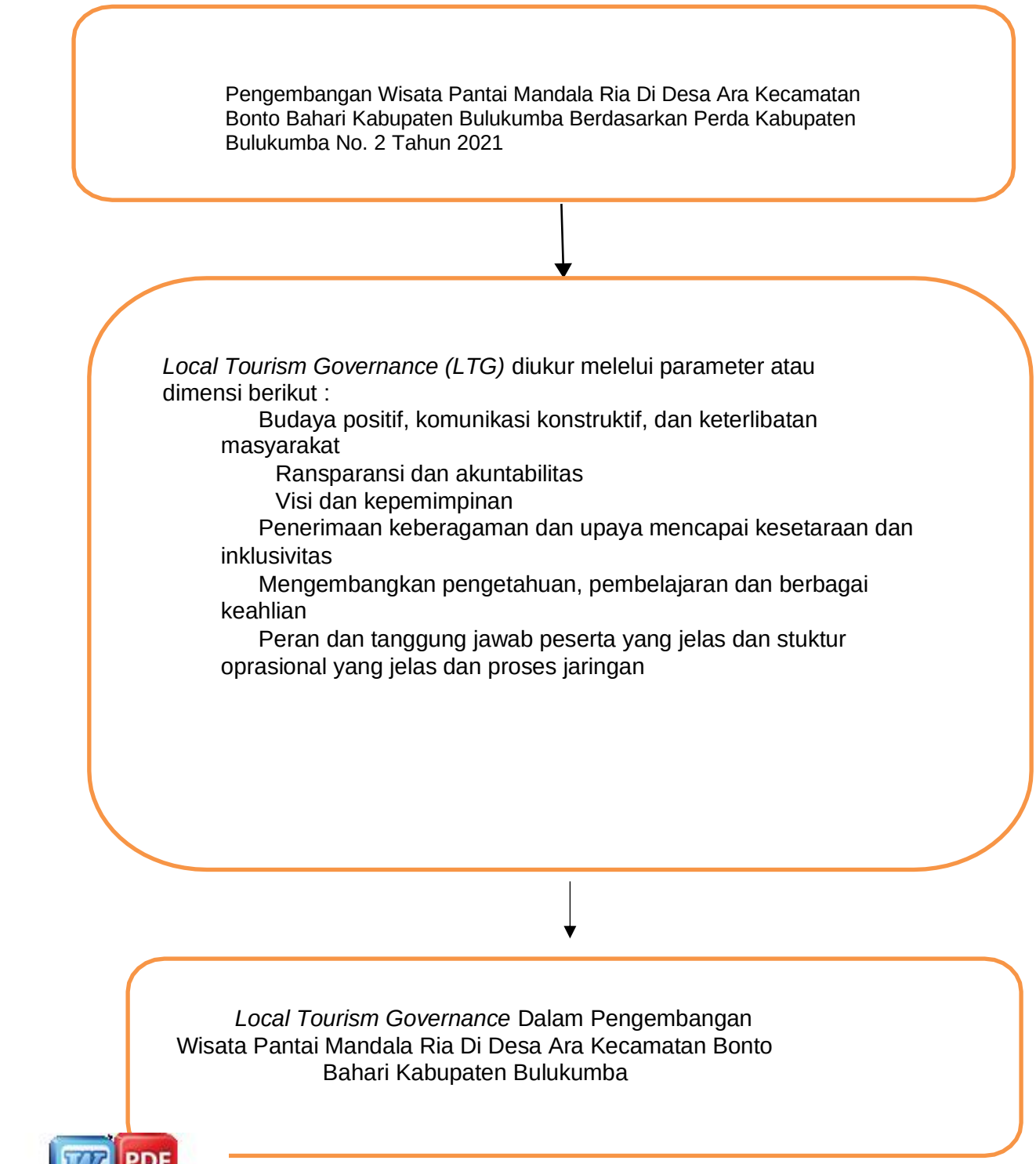

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah, oleh sebab itu penulis merujuk pada rumusan masalah penelitian yang fokus terhadap *local tourism governance* dalam pengembangan Wisata Mandala Ria di Desa Ara Kabupaten Bulukumba dengan 6 (enam) dimensi menurut Beaumont & Dredge yaitu:

- Budaya positif, komunikasi konstruktif, dan keterlibatan masyarakat pada aspek ini peneliti mengukur serta menganalisis bagaimana budaya, komunikasi serta keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata pantai Mandala Ria di Desa Ara ini. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali lebih dalam bagaimana budaya lokal yang ada di Desa Ara dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan wisata pantai Mandala Ria, serta bagaimana komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait dapat memperkuat kerjasama dan pemahaman bersama. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan promosi wisata pantai ini akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana partisipasi mereka dapat meningkatkan keberlanjutan dan daya tarik destinasi wisata tersebut.
- Transparansi dan akuntabilitas, pada aspek ini peneliti menganalisis serta mengumpulkan data mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang terjadi pada pengembangan Wisata Pantai Mandala Ria di Desa Ara ini. Peneliti memeriksa sejauh mana informasi mengenai proses pengembangan wisata pantai disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta bagaimana sistem pengelolaan sumber daya yang ada dijalankan dengan prinsip akuntabilitas. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis mekanisme pengawasan dan evaluasi yang diterapkan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengembangan wisata dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, guna meningkatkan kepercayaan publik dan keberlanjutan proyek wisata tersebut.
- Visi dan kepemimpinan, pada aspek ini peneliti melihat dan menganalisis apa visi dan bagaimana kepemimpinan yang diterapkan pada pengembangan Wisata Pantai Mandala Ria di Desa Ara. Peneliti mengeksplorasi sejauh mana visi yang dimiliki oleh pemimpin dan pihak terkait dalam pengembangan wisata ini dapat mengarahkan dan memotivasi masyarakat serta pemangku kepentingan untuk berkontribusi secara positif. Selain itu, analisis akan dilakukan terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan, apakah bersifat kolaboratif, inklusif, dan mampu menciptakan sinergi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, guna memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan wisata Pantai Mandala Ria.
- Penerimaan keberagaman dan upaya mencapai kesetaraan dan inklusivitas, selanjutnya pada aspek ini peneliti menganalisis bagaimana perilaku masyarakat sekitar dalam penerimaan keberagaman dan upaya mencapai kesetaraan dan iklusivitas pada pengembanagan Wisata Pantai Mandala Ria di Desa Ara. Peneliti mengkaji bagaimana masyarakat Desa Ara menunjukkan sikap terbuka terhadap keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial yang ada di sekitar mereka, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi interaksi dalam proses pengembangan wisata Pantai Mandala Ria. Selain itu, analisis akan dilakukan terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan inklusivitas, seperti pemberdayaan kelompok marginal, penghapusan diskriminasi, dan penciptaan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan keuntungan dari wisata tersebut.

Mengembangkan pengetahuan, pembelajaran dan berbagi keahlian, kemudian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pada aspek ini peneliti melakukan analisis bagaimana proses mengembangkan pengetahuan, pembelajaran dan berbagai keahlian yang diterapkan pada pengembanagn Wisata Pantai Mandala Ria di Desa Ara. Peneliti mengevaluasi mekanisme yang ada dalam pengembangan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan, workshop, atau transfer pengetahuan terkait dengan manajemen wisata, pemasaran, dan pelestarian lingkungan. Selain itu, analisis juga akan mencakup sejauh mana proses berbagi keahlian antar berbagai pihak, seperti pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat, dapat meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat Desa Ara, guna menciptakan pengelolaan wisata yang lebih profesional dan berkelanjutan.

- Peran dan tanggung jawab peserta yang jelas dan struktur operasional yang jelas dan proses jaringan, terakhir pada aspek ini peneliti menganalisis bagaimana peran dan tanggung jawab semua peserta atau semua yang berperan dalam pengembangan Wisata Pantai Mandala Ria di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari. Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis peran serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, masyarakat lokal, pelaku industri pariwisata, hingga organisasi non-pemerintah, untuk memastikan bahwa setiap peserta memiliki pemahaman yang jelas tentang kontribusi mereka dalam pengembangan Wisata Pantai Mandala Ria. Selain itu, penelitian juga akan melihat bagaimana struktur operasional yang ada, termasuk proses koordinasi dan komunikasi antar pihak, dapat mendukung efektivitas dan kelancaran pengelolaan wisata, serta bagaimana jaringan yang terbentuk antara berbagai pihak berfungsi untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mencapai tujuan Bersama.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengetahui *Local Tourism Governance* dalam pengembangan wisata Pantai Mandala Ria Desa Ara Kecamatan BontoBahari Kabupaten Bulukumba.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian- kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada *tourism governance* pada pengembangan wisata Bahari.
2. Manfaat Praktis, Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi peneliti

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai *tourism governance* pengembangan wisata Bahari khususnya di daerah asal peneliti sendiri.

b. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan atau masukan bagi sektor pemerintahan mengenai pengelolaan wisata bahari agar dapat terus berkembang seiring perkembangan global dan mampu dikenal hingga dunia.

c. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini mampu memberikan ilmu atau pengetahuan bagi masyarakat mengenai bagaimana *tourism governance* dalam pengembangan wisata Bahari.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II
METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian atau jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Ochiai, 1960) Penelitian kualitatif adalah pendekatan terhadap penyelidikan yang mengikuti cara tradisional dalam melakukan penelitian ilmu sosial, perilaku, dan kesehatan. Dalam proses penelitian ini, peneliti memulai dengan masalah yang perlu diselesaikan dan kemudian merumuskan pertanyaan yang, jika dijawab, akan membantu mengatasi masalah tersebut. Pertanyaan akan terjawab dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dikumpulkan dari orang-orang yang dapat membantu menjawab pertanyaan. Setelah informasi ini dikumpulkan dan dianalisis, peneliti kemudian menulis laporan penelitian yang merangkum temuan-temuannya. Kesimpulan ini disebarluaskan dalam banyak jenis laporan, seperti disertasi doktor, tesis, artikel jurnal, proposal untuk pendanaan, dan studi organisasi yang bersifat lokal. Proses ini mungkin sudah sangat dikenal oleh banyak peneliti pemula.

Dalam (Ruhansih, 2017) menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif pertama kali digunakan oleh para antropolog dan sosiolog sebagai metode penyelidikan di Indonesia dekade awal abad ke-20 (Denzin & Lincoln, 2005). Selama periode ini, analisis data kualitatif bertujuan kurang lebih pada obyektif deskripsi fenomena sosial dalam masyarakat atau dalam budaya lain. Metode penelitian kualitatif biasanya mencakup wawancara dan observasi, tetapi mungkin juga termasuk studi kasus, survei, dan analisis historis dan dokumen. Penelitian kualitatif adalah payung istilah yang digunakan untuk merujuk pada desain perspektif teoritis seperti penelitian narasi, fenomenologi, penelitian tindakan, studi kasus, etnografi, penelitian sejarah, dan analisis konten (Creswell, 2009; Hancock et al., 2009). Sedangkan deskriptif kualitatif masuk kepada penelitian kualitatif dasar. Tapi bukan berarti penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai penelitian rendah (Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. ,2016). Penelitian deskriptif yaitu studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Peneliti dapat melibatkan sebagai kombinasi data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk membuat analisis (Nazir,2005).

2.2 Desain Penelitian

Desain atau Pendekatan-pendekatan penelitian dalam kualitatif ada beberapa macam diantaranya adalah fenomenologi, etnografi, hermeneutik, grounded theory, naratif/historis, dan studi kasus. Dengan demikian, bahwa pendekatan apapun yang digunakan dalam penelitian kualitatif peneliti harus dapat memperhatikan dan memahaminya agar dalam mengungkap dan mengenali subjek penelitiannya lebih tepat dan cocok sehingga hasilnya sesuai dengan tujuannya. Peran peneliti dalam menentukan pendekatan harus dapat sesuai dengan kondisi di lapangan, disisi lain peneliti juga harus memperhatikan pendekatan yang ideal dan bersifat tetap, teknik juga bersifat situasional/fleksibel, dan perubahan tetap dimungkinkan, bilamana semua yang dipersiapkan oleh peneliti kurang sesuai atau belum cocok. Ibaratkan seperti orang memancing; ukuran mata kail harus sudah ditentukan dari awal mengenai jenis/ukuran ikan apa yang akan didapatkan atau ikan yang ada di perairan tersebut, tetapi umpan yang
nti/ditukar (mata pancing adalah pendekatan, umpan adalah tekniknya;
dsb. (Anak, 2008)
umpulan data dalam penelitian kualitatif perlu diperhatikan, sebab kualitas riset
antung dari kualitas dan kelengkapan data yang telah didapatkan. Pertanyaan
u diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, dimana, kapan, dan
. Penelitian kualitatif biasanya bertumpu pada triangulasi data yang diperoleh
tode yaitu interview, participant observation, dan analisis dokumen. Pada studi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kasus dalam penelitian ini dapat mengetahui secara mendalam mengenai *tourism governance* pada pengembangan wisata pantai Mandala Ria Desa Ara Kabupaten Bulukumba.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Ada tiga jenis informan yaitu informan kunci, informan ahli, dan informan insidensial. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya adalah seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penentuan dan pemilihan informan kunci harus disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian. Informan kunci diutamakan bersumber dari ahli yang menguasai topik penelitian, dapat pula orang yang kesehariannya beraktivitas di lokasi kajian. Misalnya, pada penelitian kebencanaan di wilayah X, informan kunci yang dapat dijadikan pedoman adalah ahli kebencanaan dengan kualifikasi akademis yang mumpuni dan tokoh lokal wilayah X tersebut yang memahami sepenuhnya keadaan di wilayah X. (Rahman, 2021)

Adapun pada penelitian ini terdiri dari beberapa informan yang mampu memberikan informasi terkait keberhasilan penelitian ini dengan studi kasus *tourism governance* pada pengembangan wisata pantai mandala ria desa ara, berikut informan yang akan terlibat:

1. Dinas Pariwisata (kepala Bidang Destinasi dan kasubag destinasi)
2. Pemerintah Setempat (Kepala Desa Desa Ara)
3. Masyarakat setempat (warga yang bermukim di sekitar wisata Pantai Mandala Ria)
4. Pemuda (Karang Taruna) (Ketua Karang Taruna)
5. Pihak swasta (Pemilik homestay/villa di Wisata Pantai Mandala Ria)

2.3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pantai Mandala Ria Desa Ara Kecamatan BontoBahari Kabupaten Bulukumba dan di Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba.

2.3.3 Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara informan dan *Focus- Group Discussion (FGD)* yang dianggap mengetahui dan memahami *tourism governance* pada pengembangan wisata pantai Mandala Ria Desa Ara Kabupaten Bulukumba.

2. Data Sekunder

   Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung berupa data pendukung yang bersumber dari literatur maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *tourism governance* pada pengembangan wisata pantai Mandala Ria Desa Ara Kabupaten Bulukumba.

2.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

   Observasi dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data melihat fenomena-fenomena tentang berbagai aspek yang terkait dengan *governance* pada pengembangan wisata pantai Mandala Ria Desa Ara en Bulukumba.

ara

Peneliti menggunakan teknik analisis data melalui wawancara agar tkan informasi yang lebih dalam terkait penelitian yang dilakukan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. *Focus-Group Discussion (FGD)*

Dalam (William, 2012) *The Focus Group Discussion (FGD), which is also referred to as group interviewing, is essentially a qualitative research methodology. It is based on structured, semi-structured, or unstructured interviews. It offers qualitative researchers the opportunity to interview several respondents systematically and simultaneously (Babbie, 2011). FGD is applauded and widely used in recent times mainly because of its strength of convenience, economic advantage, high face validity, and speedy results (Krueger, 1988). Many authors also subscribe to the notion that FGD is advantageous because of its purposeful use of social interaction in generating data (Merton et al., 1990, Morgan, 1996). It is the use of social interaction which distinguishes it from other qualitative research methodologies (Merton et al., 1990).*

Pada Focus Group Discussion (FGD) yang peneiti lakukan adalah melakukan diskusi dengan pemerintah setempat dalam hal ini yaitu kepala desa Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, mengenai bagaimana perkembangan dan MOU yang akan dibuat oleh Dinas Pariwisata dan pihan pengelola Wisata Pantai Mandala Ria.

4. Telaah Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi, pemateri menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

2.3.5 Tekhnik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, display data, dan conclusions. Adapun gambaran kegiatannya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari lagi bila diperlukan. Dalam reduksi data dapat pula dibantu dengan alat-alat elektronik dengan memberikan aspek aspek tertentu guna mempermudah proses reduksi data.

2. *Data Display* (penyajian data)

Data display (penyajian data) tahap setelah reduksi data, hal ini dilakukan dalam bentuk uraian/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya Miles & Huberman (1994) menjelaskan “the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text. Artinya yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian

tif bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan hami tentang yang terjadi. Bila hipotesis yang diberikan selalu ng oleh datanya yang di lapangan sehingga akan menjadi grounded. ni ditemukan secara induktif, berdasarkan data data yang ditemukan ngan dan diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus.

ik Kesimpulan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pengamalan dari permulaan pengumpulan data, alur, sebab-akibat/kausalitas dan proporsi-proporsi lainnya. kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Namun, kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan akan memunculkan temuan baru (novelty) yang sebelumnya belum pernah ada.

2.3.6 Validitas Dan Reabilitas Data

Validitas dan reabilitas data pada *tourism governance* pada pengembangan wisata pantai Mandala Ria Desa Ara Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

1. Validitas

a. Triangulasi sumber data : Menggunakan berbagai sumber data untuk membangun bukti yang koheren untuk penelitian, seperti memeriksa bukti dari pemerintah, masyarakat, karang taruna, dan pihak swasta.

b. Member checking : Mengkonfirmasi keakuratan temuan dengan membawa kembali hasil penelitian kepada pemerintah, masyarakat, karang taruna, dan pihak swasta untuk mendapatkan informasi mengenai kekurangan dan bagaimana solusi yang diberikan.

c. Auditing : berarti menunjukkan peran ahli dalam memperkuat hasil penelitiannya, auditing biasanya mengandalkan keterlibatan pihak luar dalam mengkonfirmasi/ mengevaluasi penelitian, dan yang biasa dipertanyakan oleh auditor ialah, apakah hasil benar-benar bersifat alamiah dan bertumpu pada kondisi/situasi setempat (grounded); apakah pengambilan kesimpulan logis; apakah strategi yang digunakan sungguh- sungguh meningkatkan kredibilitas.

2. Reabilitas

Reliabilitas dalam penelitian kualitatif dapat dilihat dari aspek: ketajamannya, observasi, analisis teks, interview, dan transcript dari perolehan data yang didapatkan dari lingkungan alamiah. Dengan demikian, hal yang terpenting perlu diperhatikan adalah:

a. interview; dimana partisipan harus mengerti pertanyaan-pertanyaan atas cara yang sama sehingga jawabannya dapat dicoding tanpa kemungkinan ketidakpastian.

b. nilai kebenaran (truth value); artinya deskripsi dari pengalaman partisipan memang benar-benar yang dialaminya (natural/alamiah).

c. bahan hasil wawancara; dipastikan harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Maka, reliabilitas dalam penelitian kualitatif ada kaitannya dengan observasi, ga peneliti harus benar-benar menguasai lapangan, mengetahui apa yang terjadi di lapangan, serta mengetahui budaya yang diteliti.

Optimized using
trial version
www.balesio.com